

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Yuliana¹
Universitas Sjakhyakirti¹
yuli_72@unisti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional yang dilaksanakan di Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 indikator, yakni: Isi kebijakan dan konteks implementasi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa: (1). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal; (2). Faktor yang memperkuat pelaksanaan program padat karya yaitu informasi dan penyuluhan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat teori *Grindle* implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional, sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Padat Karya, Pemberdayaan Masyarakat,

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies through labor-intensive programs in the national road implementation work unit which was carried out in Region I, South Sumatra Province. The method used is descriptive research with a qualitative approach. Collecting data using interview, observation and documentation methods. Data analysis was carried out in an interactive form on 3 main components, namely; Data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that implementation can be seen from 2 indicators, namely: Policy content and implementation context. From this research it was found that: (1). The implementation of community empowerment policies through labor-intensive programs has been going well but has not been maximized; (2). Factors that strengthen the implementation of labor-intensive programs are information and counseling. The conclusion of the study shows that if we look at Grindle's theory, the implementation of community empowerment policies through labor-intensive programs in the national road implementation work unit has been going well but not optimally.

Keywords: Community Empowerment, Implementation, Labor intensive.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melahirkan berbagai persoalan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya di sektor ekonomi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunandalam hal ini program padat karya yang dilaksanakan secara swakelola. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri, tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang cukup besar bagi perekonomian Negara. BPS merilis data bahwa pada kuarta II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan

hingga -5,23%. Angka ini turun dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,97% (Khoirudin, 2021). Hal seupa juga terjadi diberbagai provinsi di Indonesia tak terkecuali provinsi Sumatera Selatan. Jumlah total masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 24 Maret 2021 mencapai 17.000 orang dan korban meninggal mencapai 825 orang (Khoirudin, 2021). Pemerintah daerah juga melakukan pebatasan sosial yang dampaknya adalah pada penurunan tingkat produktifitas dan perekonomian daerah.

Data Badan Pusat Statistik (2022) laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi menunjukkan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, yaitu: Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hingga 2018 Sumatera Selatan mengalami peningkatan hingga mencapai angka 6,01%. Namun pada tahun setelahnya hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka -0,11%.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan masalah lanjutan pula bagi masyarakat. Diantaranya adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dikarenakan keadaan keuangan mereka yang memburuk. Selain itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terpaksa menghentikan aktifitas kerja mereka karena aturan dan ancaman penyebaran pandemi ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik persentase jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan. mengalami peningkatan pada akhir 2020. Dimana hal ini terjadi setelah pandemi covid-19 masuk ke daerah.

Pembatasan sosial yang diatur pemerintah telah menurunkan produktifitas pelaku usaha. Penurunan produktifitas ini mengakibatkan perubahan kebijakan pada masing masing perusahaan, diantaranya adalah efisiensi dan perampingan pegawai. Kebijakan ini berujung pada dirumahnya sebagian pekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi sebagian yang lain.

Meningkatnya jumlah pengangguran secara tidak langsung tentunya akan menyebabkan masalah baru bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Hal ini disebabkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat.

Tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS pada tahun 2015 hingga akhir 2019 jumlah masyarakat miskin di provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Namun dari akhir 2019 sampai ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,42%. Bersamaan dengan kemunculan virus corona di Indonesia jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera selatan pun meningkat hingga akhir 2020 sebesar 0,42% dari jumlah sebelumnya.

Salah satu kegiatan pembedayaan masyarakat yang kini tengah dilakukan pemerintah adalah program padat karya dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi Covid-19. Salah satu program padat karya adalah proyek infrastruktur yang antara lain jalan dan jembatan. Pelaksanaan padat karya Kementerian PUPR memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat tahun 2020 mencakup pekerjaan

revitalisasi saluran drainase, jalan nasional sepanjang 5.000 km dan Pengadaan Material Tambahan Cepat Mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp. 1,2 Triliun. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat. Program yang dilaksanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 (tiga) bulan dan diharapkan dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Satker yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang. Untuk Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan mendapat pekerjaan drainase sepanjang 11.488 meter dengan dana Rp. 1,9 Milyar dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dengan pekerjaan pemasangan batu dan mortal dan pekerjaan pembersihan drainase (rutin kondisi saluran).

Kegiatan padat karya ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utama adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi yang telah banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah pengangguran (Siahaan, 2021). Dalam program kegiatan padat karya tersebut membantu pemerintah, karena adanya sarana prasarana yang terbangun. Filosofi program padat karya adalah menyerap dan menggunakan tenaga kerja skala besar-besaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rusli (2021) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Perluasan Kesempatan Kerja Di Kota Pekanbaru” didapat hasil bahwa program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur kurang efektif. Riset ini menemukan factor-faktor yang menghambat pelaksanaan padat karya infrastruktur ini yaitu situasi alam dan Kondisi cuaca. Penelitian terkait program padat karya yang berupa infrastuktur hanya sedikit yang ditemukan. Kebanyakan penelitian yang dilakukan terkait dengan program padat karya tunai.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya yang dilaksanakan di Satker PJJN Wilayah I Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan Teori yang dikemukakan oleh G.C. Grindle.

Model menurut *Merilee S. Grindle* dalam bukunya *Politics and Policy Implementation in The Third World* (1980) dirumuskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (Grindle, 2017).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Seperti Kepala Satuan Kerja PJJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan 3 pengawas lapangan, serta kepala desa dan masyarakat sebagai Informan pendukung.

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen yang ada di kantor berupa catatan, peraturan-peraturan, keputusan, laporan, buku-buku, arsip-arsip, koran serta majalah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu melalui: *check*, *re-check* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi dan persepsi peneliti.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian lapangan dan pembahasannya. Dalam pembahasan ini, teori yang digunakan sebagai alat analisis atau guidance adalah teori dari Grindle (Grindle, 2017) dengan beberapa

indikator yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Selanjutnya indikator-indikator tersebut menjadi panduan bagi peneliti dalam menggali data lapangan dan pembahasan hasil penelitian.

Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator antara lain: indikator kepentingan yang dipengaruhi, indikator tipe manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan.

Kepentingan yang dipengaruhi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran serta pegawai dalam pelaksanaan program padat karya. Peran serta tersebut terwujud melalui penyuluhan yang dilakukan para pelaksanaan program padat karya mengandung dua kepentingan yang sejalan dengan penerapannya. Pertama kepentingan yang terdapat pada Saker Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai sumber daya yang dilibatkan terutama para pegawai pelaksana program, mereka mempunyai kepentingan didalam peran bagaimana mencapai keberhasilan didalam melaksanakan program dari kebijakan yang mereka rencanakan, kemudian kepentingan. Kedua yaitu kepentingan pegawai sebagai sasaran program yang sangat memerlukan terciptanya standar pelayanan demi kepentingan kantor mereka sendiri agar tercapai mutu yang diharapkan.

Informasi yang didapat bahwa terdapat kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan program bagi pegawai sehingga program ini dapat berjalan. Peran serta Pimpinan dalam pelaksanaan program padat karya yaitu sebagai pelaksana program yang memberikan penyuluhan para pegawai sedangkan

dari para pegawai diperoleh informasi bahwa mereka sangat antusias dalam menanggapi pelaksanaan program padat karya sehingga Pelaksanaan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan bisa berhasil.

Indikator yang kedua adalah tipe manfaat yaitu dengan melihat manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program terutama bagi pegawai di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Analisis ini bertujuan untuk melihat tipe atau jenis manfaat kebijakan bagi pegawai ketika dijalankan. Dari informasi yang didapat bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga mengandung beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pegawai terutama di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Selain pemerintah daerah dan staf pegawai yang memanfaatkan adanya program padat karya, juga masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari adanya program padat karya yaitu berupa: Adanya lapangan kerja bagi pengangguran, setengah pengangguran dan keluarga miskin dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kegiatan padat karya mengutamakan tenaga kerja lokal desa yang berasal dari desa setempat sehingga mampu menyerap tenaga kerja demi meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Manfaat lain yang dirasakan yaitu menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kelompok, serta meningkatkan

produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Indikator ketiga adalah derajat perubahan. Derajat perubahan yang diharapkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program padat karya dapat memberikan perubahan yang berarti bagi Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan kearah yang lebih baik, dari semula tidak tahu menjadi tahu dan bagaimana perubahan tersebut dapat membawa manfaat yang berarti bagi pegawai.

Adapun perubahan yang diharapkan yaitu adanya meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pemahaman terhadap pedoman standar-standar pegawai. Dengan adanya Pelaksanaan program padat karya, pegawai dapat mengupayakan standar pelayanan yang harus mereka lakukan. Adapun harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program padat karya yaitu: Terselenggaranya program padat karya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah maupun pendapatan masyarakat, terselenggaranya upaya meningkatkan motivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka sehingga mengetahui standar pelayanan dalam pelaksanaan program padat karya dan terselenggaranya pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indikator yang keempat yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan program merupakan langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program padat karya melibatkan pemerintah

dan pegawai, serta masyarakat dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai sasaran program dan masyarakat sebagai outcome.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik terbukti dengan penghargaan yang didapat dari pemerintah sehingga di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan memperoleh dana program dari pemerintah sebagai upaya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya.

Indikator yang terakhir untuk aspek isi kebijakan adalah sumber daya yang dilibatkan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan meliputi pemerintah dan Para pegawai, aparat desa, masyarakat, serta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya standar pelayanan di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Untuk sarana yang digunakan meliputi media untuk penyampaian penyuluhan dalam rangka menerapkan Pelaksanaan program padat karya, buku-buku pedoman pelaksanaan program juga alat-alat dan material dilapangan yang diperlukan dalam pembuatan drainase maupun saluran air.

Aspek yang kedua dari teori Grindle adalah aspek konteks implementasi. Aspek ini dijelaskan dengan tiga indikator yaitu: kekuasaan kepentingan dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap.

Indikator kekuasaan kepentingan dan strategi bertujuan untuk melihat strategi lembaga dan penguasa dalam menerapkan kebijakan. Data berasal dari analisis hasil wawancara dengan informan serta data-data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan program padat karya. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi atas Adanya upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana program.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi yang diterapkan dalam Pelaksanaan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan memiliki strategi yang efektif dari cara yang dilakukan sehingga pegawai mau mengikuti saran yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut salah satunya dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai tergerak hatinya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan mengikuti standar-standar pelayanan.

Indikator selanjutnya yaitu karakteristik lembaga dan penguasa sebagai indikator untuk mengetahui pelaksanaan program padat karya dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik pemerintah terutama petugas didalam melakukan penyuluhan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pimpinan dan pemerintah mempunyai sikap yang baik para pegawai dengan memberikan penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara-cara yang baik para pegawai sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri.

Indikator yang terakhir yaitu kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang dilaksanakan. Kepatuhan dan daya tanggap ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan program, karena tanpa kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan mengalami kendala karena pegawai tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka dapat mendukung pelaksanaan program dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program, berstandar pelayanan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan suatu program tentunya tidak dapat terlepas dari faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala. Faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan program padat karya adalah merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dengan mudah kebijakan direalisasikan. Faktor yang

memudahkan ini dilihat dari indikator pengetahuan dan sikap.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Apabila suatu tindakan didasari oleh pengetahuan maka perilaku tersebut akan bersikap langgeng, namun sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pegawai Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi terhadap pelaksanaan program padat karya. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan keterampilan melalui Pelaksanaan program padat karya, sehingga dengan pengetahuan yang ada pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari pegawai.

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana tanggapan pegawai terhadap Program Padat Karya terutama mengenai sikap pegawai terhadap mutu pelayanan yang ada di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pegawai terhadap Pelaksanaan program padat karya di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan mendapat tanggapan dan respon yang baik oleh

pegawai, hal ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan program. Karena dengan sikap yang baik maka pemerintah dapat dengan mudah melaksanakan program dan mendapat dukungan dari pegawai.

Selanjutnya ada juga faktor yang memperkuat pelaksanaan pelaksanaan program padat karya dapat berjalan dengan baik, faktor ini meliputi indikator informasi dan penyuluhan. Penyuluhan Program Padat Karya yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu kegiatan pemberian informasi para pegawai tentang standar operasional/pelayanan. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu menolong dirinya sendiri untuk selalu berbuat sesuai dengan standar operasional. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku individu dan pegawai sehingga mampu memelihara dan meningkatkan kemampuannya serta ikut berperan serta dalam pembangunan.

Pelaksanaan program padat karya di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan upaya penyuluhan para pegawai sebagai sasaran program agar mereka bisa menerapkan standar operasional sesuai dengan harapan program. Adanya penyuluhan ini menjadi faktor yang memperkuat terlaksananya Pelaksanaan program padat karya di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

Satuan kerja PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Balai Besar PJN V (BBPJN V) dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum adalah melaksanakan fungsi integral pengajawantahan pembangunan nasional, karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi misalnya, merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur transportasi juga berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum, merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Keseluruhan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut perlu dilaksanakan melalui pendekatan penataan ruang yang berkelanjutan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu, dimasa yang akan datang Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang handal, yaitu infrastruktur yang berkualitas dan terpercaya. Dengan meningkatkan kinerja penyedia jasa dan akses pasar jasa konstruksi yang diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Susunan Organisasi Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dipertegas dengan Keputusan Kepala Balai Besar PJNV Nomor: 02/KPTS/BW/01/2017 tentang penetapan Pembantu Pejabat Inti Satker, Petugas UAKPA, Petugas UAKPB, dan Ka. Ur TU Pada Satker Di Lingkungan Balai Besar PJN V Tahun Anggaran 2017, maka Organisasi Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas: (1). Kepala Satuan Kerja; (2). Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan, Umum dan Pelaporan); (3). Pelaksana Teknik (Asisten Program, rencana & Administrasi Teknik); (4). Pelaksana Teknik (Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan); (5). Pelaksana Administrasi (Asisten Pengelolaan BMN); (6). Pejabat Penguji SPM; (7). Bendahara Pengeluaran; (8). Pejabat Pembuat Komitmen; (9). Pejabat Pelaporan yang meliputi Pelaporan UAKPA, UAKPB.

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri, tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah melahirkan berbagai persoalan di berbagai sektor kehidupan, salahsatunya di sektor ekonomi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq. Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan, fokus pada program pemberdayaan masyarakat yaitu program padat karya. dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR bahwa: “Harapan kami, program ini dapat mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi Covid-19”.

Pelaksanaan padat karya Kementerian PUPR memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat tahun 2020 mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase, jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambahan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp. 1,2 Triliun. Untuk SatkerPJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan mendapat pekerjaan drainase sepanjang 11.488 meter dengan dana Rp.1,9 Milyar dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dengan pekerjaan pemasangan batu dan mortal dan pekerjaan pembersihan drainase (rutin kondisi saluran). Program yang dilaksanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 (tiga) bulan dan diharapkan dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Pada penelitian ini teori yang digunakan sebagai panduan adalah Teori Grindle yaitu aspek isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada aspek isi kebijakan dilihat beberapa indikator yaitu Kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang

diharapkan, pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan.

Indikator pertama kepentingan yang dipengaruhi. Indikator ini terletak pada peran pemerintah dan staf pegawai dalam pelaksanaan program, dimana pemerintah sebagai pelaksana program melalui informasi, penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan dan pegawai sebagai sasaran program sedangkan masyarakat sebagai outcome.

Selanjutnya, indikator tipe manfaat. Pelaksanaan program memberikan manfaat kepada pegawai, lingkungan kerja di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dan bermanfaat juga pada lingkungan masyarakat berupa menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, setengah pengangguran dan keluarga miskin dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kelompok.

Indikator Derajat perubahan yang diharapkan, meliputi terselenggaranya program padat karya dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai tentang pelaksanaan padat karya, terselenggaranya pelaksanaan program dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menolong dirinya sendiri dalam pekerjaan dan meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Selanjutnya, Pelaksanaan program, pelaksanaan padat karya dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan oleh Petugas yang ahli di bidangnya dan kegiatan padat karya menyerap tenaga kerja demi meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Sumber daya yang dilibatkan terdiri dari pemerintah, pegawai dan dari masyarakat terutama tenaga kerja lokal desa yang berasal dari desa setempat serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk aspek isi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Aspek selanjutnya yaitu konteks implementasi. Aspek ini dilihat dari indikator kekuasaan kepentingan dan strategi, Karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Kekuasaan kepentingan dan strategi yang dilakukan dalam program padat karya memiliki strategi yang efektif dari cara - cara yang dilakukan pemerintah sehingga pegawai mau mengikuti saran yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai mampu untuk mengikuti program tercapainya pengetahuan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Karakteristik lembaga dan penguasa, pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada pegawai dengan memberikan informasi dan penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara yang baik sehingga pegawai mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik.

Kepatuhan dan daya tanggap, pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program.

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk aspek konteks implementasi juga sudah dijalankan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala seperti mekanisme perekrutan pekerja. Mekanisme perekrutan pekerja karena jumlah kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Satuan Kerja masih kurang, dan jumlah warga yang menganggur melebihi kuota dan belum cukup terampil dalam ikut mengelola kegiatan, maka perlu pengawasan dari pihak Satuan Kerja dalam perekrutan tenaga kerja.

Tidak hanya masih memerlukan pengawasan dalam perekrutan. Program ini juga memerlukan monitoring serta pendampingan secara intensif baik dari Satuan Kerja ataupun dari Kepala Desa setempat agar kegiatan berjalan dengan lancar dan tercapainya infrastruktur yang handal dan terpenuhi program Pemerintah.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya jika dilihat dari teori Grindle sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Program ini dilihat dari dua aspek yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa faktor yang memperkuat pelaksanaan program padat karya yaitu Informasi dan Penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bps.go.id. (2022, 23 Maret). *Provinsi Sumatera Selatan* dalam Angka 2022. diakses pada <https://sumsel.bps.go.id/publication/2022/02/25/f9646f2d59150d7c3e1201c2/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2022.html>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the third World*. Princeton University Press
- Khoirudin, A. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. *Iqtishaduna*, 4(1), 532–541. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v6i1.426>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Source Book Edition 3* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc
- Siahaan, D., & SD, R. Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Perluasan Kesempatan Kerja di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 8(69), 1–16 <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30612>
- Singirimbun, M., & Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono, S. (1994). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung